

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sebagian besar daerahnya adalah lautan. Dari total keseluruhan luas wilayah Indonesia terdiri dari 75,32 % lautan yang memiliki beraneka ragam sumber daya baik hayati maupun non hayati yang sangat besar. Indonesia memiliki panjang garis pantai 95.181 km di kawasan daerah pesisir (Kementrian Kelautan dan perikanan 2010). Komoditas yang sangat berpotensi adalah komoditas garam, hampir setiap daerah pesisir di Indonesia berpotensi untuk memproduksi garam. Hal ini di karenakan bahan dasar utama pembuatan garam adalah air laut.

Dengan kekayaan alam yang ada, seharusnya Indonesia memanfaatkan potensi dari sumber daya alam yang ada dengan optimal, jika pemanfaatannya optimal Indonesia akan mampu menghasilkan garam yang berkualitas untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri bahkan bisa ekspor keluar. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya saat ini Indonesia masih membutuhkan pasokan garam dari negara lain. Pada tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan garam nasional Indonesia impor garam sebesar 1.950 juta ton. Namun produksi garam dalam negeri hanya mampu mencukupi setengahnya saja dari total kebutuhan garam pertahunnya. Petani kita hanya mampu memproduksi garam sebesar 2.190 juta ton saja. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan garam yang setengahnya lagi pemerintah terpaksa melakukan impor garam dari negara lain (Pusat Data dan Informasi KIARA 2014).

Salah satu daerah penghasil garam terbesar di Indonesia adalah Pulau

Madura. Garam masih menjadi salah satu komoditas unggulan di Madura, sejak dahulu hingga sekarang Madura dikenal sebagai produsen utama penghasil garam hampir sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani garam. Hal ini karena Madura dikelilingi oleh pantai, kebanyakan daerahnya adalah daerah pesisir sehingga untuk mendapatkan air laut untuk bahan dasar pembuatan garam tidaklah susah. Saat ini pusat pembuatan garam di Indonesia terkonsentrasi di pulau Madura Jawa timur.

Madura memiliki luas lahan untuk pertanian garam sebesar 15.347 Ha, terbagi menjadi tiga kabupaten yaitu kabupaten Sampang mempunyai luas lahan pegaraman sebesar 2.205 Ha, kabupaten Pamekasan memiliki luas lahan sebesar 3.075 Ha, dan sumenep yang menjadi pemasok garam terbesar dari kedua kabupaten lainnya, kabupaten sumenep mempunyai luas lahan pegaram sebesar 10.067 Ha. Di Sumenep terdapat beberapa perusahaan garam besar yaitu PT. Garam, PT. Budiono, PT. Pilar Raya dan PT. Gerindo. Karena keberadaan lembaga inilah yang mempermudah para petani garam untuk memasarkan hasil produksi garam para petani yang ada di Sumenep. Para perusahaan tersebut membeli garam dari petani dan kemudian di pasarkan didaerah luar Madura. Pada saat ini Madura mampu menghasilkan garam sebanyak 800.000 ton pertahunnya Dispendigra (2014)

Lahan pegaraman yang tersedia hanya sebagian kecil saja yang dikelola oleh perusahaan garam yang ada di Madura yaitu sebesar 5.116 Ha saja yaitu juga terbagi di tiga Kabupaten yaitu Sampang 1.046 Ha, Pamekasan 907 Ha, dan di Sumenep sebesar 3.163 Ha. Dan sisanya dikelola oleh masyarakat setempat secara tradisional. Perusahaan yang mengelola lahan pegaraman terbesar adalah PT. Garam yaitu berada di Kabupaten Sumenep (PT. Garam Persero, 2014).

Sumenep adalah Kabupaten yang terletak di paling timur Pulau Madura. Diantara Kabupaten yang lain Sumenep merupakan Kabupaten yang paling banyak memproduksi garam. Karena di Sumenep ada perusahaan garam yang mempunyai lahan besar yang berada di Desa Karang Anyar Kabupaten Sumenep. Dari dulu PT. Garam menghasilkan garam yang melimpah, tenaga kerja yang diambil yaitu dari masyarakat setempat dari desa Karang Anyar sendiri dan ada yang dari luar desa.

Desa Karang Anyar termasuk desa pesisir letaknya dekat dengan laut. Masyarakat disana hampir seluruhnya bekerja sebagai petani garam dan mereka menggantungkan hidupnya pada hasil panen. Bertani garam yang sampai saat ini masih menjadi mata pencaharian pokok masyarakat disana, yang sudah mereka lakukan sejak lama dan sudah turun temurun. Hasil produksi garam di desa Karang Anyar cukup besar jika dibandingkan dengan daerah lain. Tabel 1.1 adalah data penduduk di desa Karang Anyar berdasarkan jenis mata pencahariannya.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Bekerja Desa Karang Anyar berdasarkan Mata
Pencaharian Tahun 2014.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah penduduk (jiwa)
1.	Karyawan/TNI/POLRI	25
2.	Wiraswasta	50
3.	Tani garam	780
4.	Pertukangan	15
5.	Buruh tani	243
6.	Pensiunan	15
7.	Nelayan	156
8.	Pemulung	1
9.	Jasa	10
	Total	1295

Sumber : profil desa 2014

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petambak garam memiliki angka tertinggi yaitu sebesar 780 jiwa dan yang

ke dua adalah masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani sebesar 243 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di desa Karang Anyar bermata pencaharian sebagai petambak garam. Hal ini juga didukung oleh bahan yang ada di desa tersebut yang menjadi bahan dasar pembuatan produksi garam. Hampir semua lahan pertanian yang ada di desa Karang Anyar semuanya adalah lahan untuk pertanian garam. Hal ini karena iklim dan letak geografis desa Karang Anyar sangat berpotensi untuk pengembangan produksi garam desa tersebut sudah memenuhi syarat untuk pengembangan usaha tambak garam (Syafii 2006). Karang Anyar adalah desa yang terletak di kawasan pesisir di Sumenep.

Jika dilihat dari kondisi saat ini permasalahan garam yang ada di Indonesia bukan hanya dari ekspor dan impor garam saja, akan tetapi masalah garam tidak dapat dipisahkan dari sistem tata niaga untuk pemasaran hasil produksi garam dari petani garam. Jika dilihat dari kondisi yang terjadi saat ini, pada tata niaga garam yang diterapkan rakyat berada dalam kondisi yang tidak jelas, bahkan hampir tidak ada masyarakat tidak mengerti sistem yang diterapkannya. Seperti yang sudah terjadi pada tahun 2012 silam kelompok petani garam yang ada di Madura pada waktu itu mengadu pada pihak komponen yang terkait dengan masalah tersebut yaitu Kemenko perekonomian RI agar mereka alur tata niaga yang jelas konsisten dan berpihak pada petani garam, bukan sebaliknya malah merugikan petani garam.

Dan pada waktu itu tuntutan juga di sampaikan oleh himpunan masyarakat petani garam (HMPG) Jawa Timur, yang menuntut untuk membuat sistem tata niaga yang jelas dan berpihak kepada rakyat kecil, tuntutan yang sama juga diungkapkan oleh juga Persatuan Petani Garam Rakyat Sumenep (PERRAS), dan Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (APGASI) yang sampai melakukan aksi

tabur garam di gedung DPRD yang menunjukkan rasa keberatan terhadap sistem tata niaga yang amburadul dan tidak ada kejelasan.

Pemerintah sudah membuat kebijakan mengenai masalah tata niaga garam. Pertama pemerintah mengeluarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 360/MPP/5/2004 tentang impor garam, dan juga dari menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang ketentuan impor garam. Dan permindag No. 44/M-DAG/PER/10/2007 Tentang perubahan atas aturan menteri perdagangan No. 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang ketentuan impor garam. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan perbaikan harga dasar garam rakyat yang telah diatur melalui peraturan direktur Jenderal perdagangan luar negeri No 2/DAGLU/PER/5/2011 bahwa harga garam rakyat pada saat itu ditingkat pengumpul atau *collecting point* (kondisi curah hujan diatas truk) yang harus dibeli oleh importir atau produsen IP untuk KP1 minimal 750,- /kg dan KP2 minimal 550,-/kg. dan kebijakan tata niaga impor garam ini telah diperbarui lagi pada tanggal 4 september 2012 dengan permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2012.

Semua kebijakan yang dibuat pemerintah seperti diatas pada dasarnya mengatur tentang tata niaga impor garam saja, sedangkan untuk garam rakyat hanya diselipkan saja dibeberapa bagian saja dari kebijakan yang dibuat. Sampai saat ini masih belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang tata niaga garam rakyat, sehingga kondisi tata niaga garam rakya saat ini masih kacau dan tidak ada kejelasan sama sekali.

Seharusnya kelebihan permintaan garam yang terjadi saat ini dapat dimanfaatkan oleh para petani garam. Mereka dapat lebih meningkatkan lagi produksinya karena potensi alam yang dimiliki akan sangat membantu para petani

garam. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh petani di desa Karang Anyar.

Table 1.2
Ketetapan Harga Garam Tahun 2014 berdasarkan Kualitas

No	Kualitas	Harga (Rp)/ ton
1.	I	700.000,00
2.	II	600.000,00
3.	III	500.000,00

Sumber : data primer

Pemasaran hasil tani garam terdapat tiga tingkatan kelas seperti tertulis dalam table 1.2. untuk garam yang tergolong dalam kelas I maka satu tonnya seharga Rp 700.000,00 untuk golongan kelas II seharga Rp. 600.000,00 dan untuk kelas III seharga Rp. 500.000,00. Harga tersebut adalah harga yang menjadi patokan harga garam rakyat di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Dalam tata niaga garam pun mempunyai beberapa sistem yang diterapkan untuk garam rakyat di Sumenep. Petani garam tidak langsung menjual hasil produksinya ke PT. Garam dan perusahaan lainnya akan tetapi masih ada beberapa proses atau jalan lagi untuk menjual garam. Perusahaan mempunyai beberapa tim yang dipercaya untuk mengumpulkan garam dari petani sebagai pengumpul yang langsung berhubungan dengan petani, nantinya pengumpul akan di jual langsung ke perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Tata Niaga Garam Rakyat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Karena di desa Karang Anyar terdapat satu perusahaan garam yang menjadi konsumen akhir sekaligus penentu harga jual garam rakyat di desa tersebut. Seharusnya tata niaga yang ada disana proses pemasarannya lebih pendek dan memberikan keuntungan yang maksimal pada produsen atau petani garam rakyat. Akan tetapi kenyataan dilapangan pada saat peneliti melakukan

observasi awal tata niaga disana tidak ada kejelasan dan hargaupun masih buram sehingga petani tidak dapat memaksimalkan keuntungannya. Selama ini juga masih belum ada penelitian tentang tata niaga garam rakyat di Desa Karang Anyar. Penelitian yang pernah dilakukan hanyalah tentang kelayakan usaha tani garam dan sistem yang dipakai petani dalam menghasilkan garam. Jadi tata niaga garam rakyat ini perlu untuk dilakukan suatu penelitian.

1.2 Fokus Permasalahan

Dari latar belakang di atas maka peneliti memilih fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bagaimana tata niaga garam di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana alur tata niaga garam rakyat di Desa Karang Anyar, kabupaten Sumenep serta mengetahui siapakah yang paling banyak memperoleh keuntungan dalam sistem tata niaga, struktur pasar, dan efisiensi tata niaganya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi fakultas ekonomi serta dapat memberikan gambaran mengenai usaha tani garam dan mengenai tata niaga garam rakyat yang

diterapkan khususnya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, kanupaten sumenep.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi subjek peneliti

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan untuk lebih memahami sistem tata niaga garam rakyat dan pemasaran garam. agar petani dapat membedakan bagaimana sistem yang seharusnya dalam pemasaran garam rakyat.

b. Bagi masyarakat Desa Karang Anyar

Dapat menjadi pandangan bagi masyarakat khususnya petani garam agar mengetahui tata niaga yang benar sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan keuntungan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan acuan dalam memberikan informasi tentang usaha tani garam dan tata niga yang diterapkan dalam pemasaran garam rakyat.